



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI
JAWA TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon : 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Februari 2022

PENGGUNA ANGGARAN

RIENA RETNANINGRUM, SH

NIP.19641026 198909 2 001



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi



Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Menyediakan informasi mengenai Posisi Sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
6. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
7. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;



8. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
9. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
10. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan. Adapun Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/ defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban



jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap
- g. Aset Lainnya
- h. Kewajiban jangka pendek
- i. Kewajiban jangka panjang
- j. Ekuitas

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/ Defisit dari kegiatan non operasional
- d. Pos luar biasa
- e. Surplus/ Defisit LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/ defisit LO pada periode bersangkutan



- c. Koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Bagan Akun Standar

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro

- 2.1. Ekonomi Makro



2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan-LO

5.3.2. Beban

5.3.3. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup



BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pada tahun 2021 kondisi ekonomi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang berbeda dibandingkan tahun 2020. Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 2,56 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yang tumbuh sebesar 17,83 persen; diikuti oleh Komponen PMTB dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang masing-masing tumbuh sebesar 6,72 persen dan 6,28 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) tumbuh sebesar 16,62 persen.

Ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2021 tumbuh sebesar 2,44 persen dibanding kumulatif sampai dengan triwulan III-2020 (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 16,85 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar 5,22 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 3,97 persen; Komponen PK-RT sebesar 1,48 persen dan Komponen PK-P sebesar 0,10 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) tumbuh sebesar 15,21 persen.

Ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2021 tumbuh sebesar 2,44 persen dibandingkan dengan kumulatif sampai dengan triwulan III-2020 (c-to-c). Semua lapangan usaha selama tiga triwulan mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Konstruksi sebesar 7,57 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,00 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,74 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga



tumbuh positif masing-masing sebesar 0,60 persen dan 0,01 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,03 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,72 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,58 persen.

Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,56 persen dibanding triwulan III-2020 (y-on-y). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,23 persen; Konstruksi sebesar 12,91 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,13 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 2,62 persen dan 6,52 persen. Sebaliknya, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar -6,12 persen. Lapangan usaha lainnya yang tumbuh positif di antaranya Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,80 persen; Jasa Perusahaan sebesar 3,05 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 2,47 persen

2.2. Kebijakan Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah (GRMS), yaitu bangunan sistem aplikasi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.



Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2020 yang meliputi:

- a. Optimalisasi pungutan PAD melalui:
 - 1) Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
 - 2) Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/ wajib pajak secara akuntabel;
 - 4) Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*;
- b. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur;
- c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- d. Inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- f. Optimalisasi BUMD;
- g. Penyempurnaan dasar hukum pungutan.



2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Upaya untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 melalui pelaksanaan kebijakan Belanja Daerah, yaitu:

- a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :
 - 1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - 2) Belanja Bunga dari pejabat daerah digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
 - 3) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - 4) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - 5) Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik;
 - 6) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/ kota;
 - 7) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah desa;
 - 8) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak



diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk :

- 1) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional;
- 2) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/ Kota;

b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- 1) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
- 2) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
- 3) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Belanja Langsung yang diarahkan untuk :



- 1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- 2) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- 3) Mengakomodir program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan;
- 4) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- 5) Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
- 6) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan, diarahkan untuk :



- a. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- b. Pembentukan dana cadangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.



BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp99.617.639.354,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) atau tercapai 93,11% dari target sebesar Rp.106.994.593.000,00 (*Seratus Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp15.240.036.264,00 (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) atau 15,30% dari total belanja
2. Belanja Barang Jasa sebesar Rp67.310.026.839,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) atau 67,57% dari total belanja
3. Belanja Modal sebesar Rp.13.567.576.251,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) atau 13,62% dari total belanja
4. Belanja Hibah sebesar Rp. 3.500.000.000 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) atau 3,51% dari total belanja

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 yang tidak optimal antara lain :

- a. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;



- b. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;
- c. Belanja modal melalui E-Katalog di beberapa kegiatan;
- d. Belanja Bahan Material karena tidak terselenggaranya kegiatan seleksi & final FK Mitra dikarenakan menimbulkan kerumunan
- e. Pandemi Covid-19, banyak kegiatan dilaksanakan melalui virtual.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Satuan Kerja Perangkat : Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah
Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Refocusing	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 90%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.167.000.000	23.806.606.880	100%	94,59	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	733.250.000	710.378.925	100%	96,88	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah **	69.300.000	67.448.500	100%	97,33	
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	369.200.000	363.986.900	100%	98,59	
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	137.650.000	130.269.525	100%	94,64	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah **	81.250.000	76.136.500	100%	93,71	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	75.850.000	72.537.500	100%	95,63	
	Administrasi Keuangan	15.869.372.000	15.341.554.289	100%	96,67	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	15.679.372.000	15.240.036.264	100%	97,20	
2	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **	70.000.000	47.195.525	100%	67,42	
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan **	100.000.000	39.519.800	100%	39,52	kegiatan dilakukan secara daring
4	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran **	20.000.000	14.802.700	100%	74,01	kegiatan dilakukan secara daring
	Administrasi Umum	8.325.878.000	7.537.452.166	100%	90,53	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	17.600.000	6.635.000	100%	37,70	sesuai kebutuhan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	675.115.000	498.016.937	100%	73,77	sesuai kebutuhan



*Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020*

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Refocusing	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 90%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	1.659.759.000	1.599.554.150	100%	96,37	
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	140.900.000	137.485.000	100%	97,58	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	507.250.000	424.439.500	100%	83,67	sesuai kebutuhan
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	291.250.000	288.986.680	100%	99,22	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	149.200.000	149.200.000	100%	100,00	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	139.200.000	138.700.000	100%	99,64	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	35.000.000	35.000.000	100%	100,00	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	503.115.000	450.725.500	100%	89,59	Pengembalian sisa pengadaan
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	12.000.000	7.438.250	100%	61,99	sesuai kebutuhan
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	69.200.000	65.197.500	100%	94,22	
13	Penyediaan Makanan dan Minuman **	285.000.000	142.630.785	100%	50,05	tidak terserap karena kebijakan PPKM
14	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	600.000.000	520.906.100	100%	86,82	tidak terserap karena kebijakan PPKM
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor **	100.000.000	98.230.000	100%	98,23	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	2.462.889.000	2.374.026.914	100%	96,39	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	499.200.000	456.118.100	100%	91,37	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	15.000.000	14.786.750	100%	98,58	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	149.200.000	114.375.000	100%	76,66	Pengembalian sisa lelang
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	15.000.000	15.000.000	100%	100,00	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	238.500.000	217.221.500	100%	91,08	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal **	238.500.000	217.221.500	100%	91,08	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	46.395.722.000	41.046.399.274	100%	88,47	-
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	46.395.722.000	41.046.399.274	100%	88,47	
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik **	928.240.000	793.338.273	100%	85,47	
2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah **	1.776.698.000	1.662.482.255	100%	93,57	Makan-minum dan perdin tidak terserap karena kebijakan PPKM



Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Refocusing	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 90%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik **	4.960.035.000	4.292.201.450	100%	86,54	
4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik **	8.606.116.000	7.908.989.000	100%	91,90	Terdapat satu tenaga teknis yang tidak terserap, dan honor narsum, perdin tidak terserap karena kebijakan PPKM
5	Pelayanan Informasi Publik **	350.000.000	349.561.382	100%	99,87	
6	Layanan Hubungan Media **	2.967.225.000	2.893.017.000	100%	97,50	
7	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan **	3.484.360.000	3.126.334.100	100%	89,72	
8	Manajemen Komunikasi Krisis **	16.822.505.000	13.603.727.364	100%	80,87	Makan-minum dan perdin serta keg pameran tidak terserap karena kebijakan PPKM
9	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik **	264.948.000	239.568.650	100%	90,42	Dialog Radio tidak terserap karena dilaksanakan melalui daring
10	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah **	1.750.000.000	1.736.331.650	100%	99,22	
11	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas **	4.485.595.000	4.440.848.150	100%	99,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28.006.283.000	27.639.155.213	100%	98,69	
	<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	10.013.234.000	10.006.667.772	100%	99,93	
1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi **	15.750.000	12.163.972	100%	77,23	
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi **	197.500.000	195.640.200	100%	99,06	efisiensi belanja jasa sewa paket data help desk data center
3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah **	9.799.984.000	9.798.863.600	100%	99,99	
	<i>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	17.993.049.000	17.632.487.441	100%	98,00	
1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah **	9.202.431.000	9.072.813.151	100%	98,59	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik **	325.000.000	320.781.900	100%	98,70	
3	Penyelenggaraan Sistem	955.519.000	933.286.500	100%	97,67	



Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Refocusing	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 90%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Penghubung Layanan Pemerintah **					
4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah **	199.200.000	195.679.000	100%	98,23	
5	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi **	1.064.872.000	1.042.201.750	100%	97,87	
6	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik **	5.404.572.000	5.231.273.390	100%	96,79	
7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas **	841.455.000	836.451.750	100%	99,41	
	URUSAN STATISTIK	1.390.583.000	1.380.859.142	100%	99,30	
IV	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</u>	<u>1.390.583.000</u>	<u>1.380.859.142</u>	100%	<u>99,30</u>	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1.390.583.000	1.380.859.142	100%	99,30	-
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral **	1.120.000.000	1.111.552.603	100%	99,25	
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi **	270.583.000	269.306.539	100%	99,53	
	URUSAN PERSANDIAN	6.035.005.000	5.751.368.845	100%	95,30	
V	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</u>	<u>6.035.005.000</u>	<u>5.751.368.845</u>	100%	<u>95,30</u>	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2.819.992.000	2.733.839.055	100%	96,94	-
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi **	505.740.000	497.044.330	100%	98,28	
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi **	465.928.000	454.088.725	100%	97,46	
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis	266.200.000	254.413.000	100%	95,57	



Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Refocusing	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 90%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Elektronik dan Non Elektronik **					
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi **	1.582.124.000	1.528.293.000	100%	96,60	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	3.215.013.000	3.017.529.790	100%	93,86	
1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi **	3.215.013.000	3.017.529.790	100%	93,86	
	<u>TOTAL</u>	106.994.593.000	99.624.389.354	100%	93,11	



BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas di terima pada Kasda. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kasda yang mengurangi dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kasda, khusus melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/ sosial di masa depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupaun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang



diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan, aset di akui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada SKPD berupa kewajiban kepada PPKD berupa keterlambatan penyampian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih aset dan utang pemerintah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas Dana lancar dan Ekuitas Dana Diinventasikan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

- a) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- b) Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



- c) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/ keuangan dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
 - c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- d) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual.
- e) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f) Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Biro Keuangan.

b. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.



- b) Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan di Bank, dan setara kas.
- c) Kas dan setara kas diakui pada saat :
 - a. Memenuhi definisi kas dan/ setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
- d) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.
- e) Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK.

c. Kebijakan Akuntansi Investasi

- a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- c) Pengakuan investasi :
 - a) Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - b) Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu



investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

d) Pengukuran Investasi

a) Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

b) Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

e) Penyajian/pengungkapan

a) Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.

b) Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka non permanen.

c) Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

d. Kebijakan Akuntansi Piutang

a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- b) Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya.
- c) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d) Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/ penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang.

e. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berupa :
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah,
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi,



- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c) Persediaan diakui pada saat :
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- d) Persediaan diukur melalui :
 - a) Biaya biaya peroleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.
- e) Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar

f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan



bangunan; jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

- c) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:
 - a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- d) Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- e) Komponen biaya perolehan aset terdiri dari :
 - a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat
 - b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- f) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah \geq Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan adalah \geq Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
 - c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan,



dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- g) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasi menambah nilai aset dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran tersebut memperpanjang masa manfaat/ kapasitas/ kualitas/ *volume* aset yang telah dimiliki; dan
 - b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya.
 - h) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (*residu*).
 - i) Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
 - j) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
 - k) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
 - l) Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
-



- m) Perlakuan khusus, penyajian aset bersejarah tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.

g. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

- a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b) Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
- c) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- d) Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

h. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- a) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b) Aset lainnya antara lain :
 - a) Aset tak berwujud
 - (1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis aset tak berwujud antara lain : *goodwill*, hak paten, hak cipta, royalti, *software*, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
 - (2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :



- (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- (3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- b) Tagihan Penjualan Angsuran
- (1) Tagihan Penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.
 - (2) TPA diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
 - (3) TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai kasda.
- c) Tuntutan Ganti Rugi Daerah
- (1) Tuntutan ganti rugi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun



tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atas kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

(2) Tuntutan Ganti Rugi disebabkan oleh Bendahara diakui dapat terdiri dari:

(a) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan BMN tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

(b) Pengakuan atas piutang tuntutan perbendaharaan diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atas Surat Keputusan Pembebanan

(c) Pengakuan Beban apabila kekurangan kas terbukti bukan kesalahan bendahara, maka diakui sebagai beban non operasional.

(3) Tuntutan Ganti Rugi disebabkan pegawai negeri bukan bendahara dapat terdiri dari:

(a) Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

(b) Pengakuan atas piutang TGR diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau surat keputusan pejabat berwenang.



- (c) Pengakuan beban apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- (4) Kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan terdiri dari:
 - (a) Pengakuan Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan;
 - (b) Pengakuan atas kekurangan aset diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan;
 - (c) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah diakui di neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan;
 - (d) Pengakuan Pendapatan LRA diakui saat diterima di Kas Negara/ Daerah;
 - (e) Pengakuan Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan.
- (5) Pengukuran nilai kerugian daerah, sebagai berikut:
 - (a) Kerugian daerah berupa uang tunai diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya;
 - (b) Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga;
 - (c) Kerugian daerah berbentuk BMN diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik BMN;
 - (d) Kerugian daerah berbentuk persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk



- menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya;
- (e) Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli;
 - (f) Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim;
 - (g) Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima.
- (6) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari 'Aset Lainnya' dan informasi yang diperlukan diungkapkan dalam CaLK.
- d) Aset kemitraan dengan pihak ketiga
 - (1) Aset kerjasama/ kemitraan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki.
 - (2) Aset kerjasama/ kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
 - e) Aset lain-lain
 - (1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.



- (2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- (3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

i. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- 1) Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban diklasifikasikan menjadi :
 - a) Kewajiban jangka pendek
 - (1) Kewajiban jangka pendek diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (2) Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer, dan utang jangka pendek lainnya.
 - b) Kewajiban jangka panjang
 - (1) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (2) Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- 2) Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk



menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

- 3) Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam Neraca dan CaLK

j. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.

k. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

a) Pendapatan LO

(a) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

(b) Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(c) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK.

b) Pendapatan LRA



- (a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
- (b) Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali pendapatan BLUD dan disajikan dalam LRA dan LAK.

I. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer

a) Beban

(a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

(b) Pengakuan dan pengukuran beban

(1) Beban Operasi

i. Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/ TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.

ii. Beban barang dan Jasa

- Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan yaitu pada saat barang telah diterima
- Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dsalam



dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

- Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul
- Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah.
- Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/ jasa oleh Pihak Ketiga.
- Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
- Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.
- Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan piutang dan metode penghapusan langsung

(2) Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

b) Belanja



- (a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - (b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkandan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
 - (c) Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :
 - (1) LRA sebagai pengeluaran daerah
 - (2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi
 - (3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi
 - (4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.
- c) Transfer
- (a) Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
 - (b) Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan Pengeluaran)



- a) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan ada 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- b) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

n. Kebijakan Akuntansi Koreksi dan Pengembalian

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- 1) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali terdiri atas : kesalahan tidak berulang yang terjadi periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi periode sebelumnya.
- 2) Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi



tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.



BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN REKENING LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA. 2021 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan TA.2021.

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Pendapatan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2 Belanja dan transfer	106.994.593.000,00	99.617.639.354,00	93,11	77.764.066.461,00	18.430.931.593,00	23,70
Surplus/(Defisit)	(106.994.593.000,00)	(99.617.639.354,00)	93,11	(77.764.066.461,00)	(18.430.931.593,00)	23,70
3 Penerimaan Pembiayaan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4 Pengeluaran Pembiayaan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Pembiayaan netto	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
5 SiLPA	(106.994.593.000,00)	(99.617.639.354,00)	93,11	(77.764.066.461,00)	(18.430.931.593,00)	23,70

Realisasi Anggaran tidak mencapai target dikarenakan :

Kegiatan menyesuaikan kebutuhan dan adanya kebijakan PPKM mendadak Jawa Bali pada triwulan ke 3 sehingga banyak kegiatan dilaksanakan secara daring

5.1.1. Pendapatan Daerah

Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	-	-	0,00	-
Pendapatan Transfer	-	-	0,00	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	0,00	-
Jumlah	-	-	0,00	-

(Dalam Rupiah)



5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	0,00	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	0,00	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	0,00	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	0,00	-
Jumlah	-	-	0,00	-

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	0,00	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	0,00	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	0,00	-
Pajak Air Permukaan	-	-	0,00	-
Pajak Rokok	-	-	0,00	-
Jumlah	-	-	0,00	-

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2	Retribusi Jasa Usaha	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
3	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

(Dalam Rupiah)



5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00..

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	0,00	-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-	0,00	-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	0,00	-

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	0,00	-
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	0,00	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	0,00	-
Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	0,00	-
Jasa Giro	-	-	0,00	-
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	0,00	-
Pendapatan Bunga	-	-	0,00	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	0,00	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-	0,00	-
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	0,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	0,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	0,00	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	0,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-	0,00	-
Pendapatan BLUD	-	-	0,00	-
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	0,00	-
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	0,00	-
Jumlah	-	-	0,00	-

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	0,00	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	0,00	-

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hibah	-	-	0,00	-
Dana Darurat	-	-	0,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00	-

5.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

BELANJA DAERAH	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Operasional	92.986.420.000,00	86.050.063.103,00	92,54	56.786.419.361,00	25.841.002.442,00	45,51
Belanja Modal	14.008.173.000,00	13.567.576.251,00	96,85	20.977.647.100,00	(7.410.070.849,00)	(35,32)
Belanja Tidak Terduga	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Transfer	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	106.994.593.000,00	99.617.639.354,00	93,11	77.764.066.461,00	18.430.931.593,00	23,70

Belanja Daerah tidak mencapai target dikarenakan :

Belanja Operasional Kegiatan menyesuaikan kebutuhan dan mengikuti adanya kebijakan PPKM mendadak Jawa Bali pada triwulan ke 3 sehingga banyak kegiatan dilaksanakan secara daring

5.1.2.1. BELANJA OPERASIONAL **Rp86.050.063.103,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp86.050.063.103,00 atau 92,54% dari anggaran Rp92.986.420.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp56.786.419.361,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Pegawai	15.679.372.000,00	15.240.036.264,00	97,20	18.608.437.388,00	(3.368.401.124,00)	(18,10)
Belanja Barang dan Jasa	73.807.048.000,00	67.285.947.839,00	91,20	38.177.981.973,00	29.209.403.566,00	76,51
Belanja Bunga	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Subsidi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!



Jumlah	92.986.420.000,00	86.050.063.103,00	92,54	56.786.419.361,00	25.841.002.442,00	45,51
--------	-------------------	-------------------	-------	-------------------	-------------------	-------

Belanja Operasional tidak mencapai target dikarenakan :

Belanja Barang dan Jasa yang tidak memenuhi target dikarenakan

- kegiatan menyesuaikan kebutuhan dan mengikuti kebijakan PPKM mendadak Jawa Bali pada triwulan ke 3 sehingga banyak kegiatan dilaksanakan secara daring
- Belanja Barang sub Belanja Makan dan Minum dengan penyerapan 77,07% dikarenakan kegiatan Pameran FK Mitra di Bidang Informasi Komunikasi Publik tidak terserap karena kebijakan PPKM
- Belanja Jasa sub Belanja Sewa Sarana Mobilitas dengan penyerapan 30,49% dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara daring mengikuti kebijakan PPKM
- Belanja Pemeliharaan sub belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dengan penyerapan 85,39% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan belanja STNK

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai **Rp15.240.036.264,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.240.036.264,00 atau 97,20% dari anggaran Rp15.679.372.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.608.437.388,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.715.479.000,00	7.553.329.231,00	97,90	7.953.149.798,00	(399.820.567,00)	(5,03)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.963.893.000,00	7.686.707.033,00	96,52	8.184.457.590,00	(497.750.557,00)	(6,08)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	#DIV/0!	2.470.830.000,00	(2.470.830.000,00)	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Pegawai BOS	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Pegawai BLUD	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	15.679.372.000,00	15.240.036.264,00	97,20	18.608.437.388,00	(3.368.401.124,00)	(18,10)



5.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp7.553.329.231,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.553.329.231,00 atau 97,90% dari anggaran Rp 7.715.479.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 7.953.149.798,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok ASN	5.654.225.000,00	5.580.213.865,00	98,69	5.956.765.200,00	(376.551.335,00)	(6,32)
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	495.671.000,00	490.068.064,00	98,87	522.975.562,00	(32.907.498,00)	(6,29)
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	277.053.000,00	274.460.000,00	99,06	266.710.000,00	7.750.000,00	2,91
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	205.655.000,00	186.740.000,00	90,80	141.700.000,00	45.040.000,00	31,79
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	177.763.000,00	175.305.000,00	98,62	204.645.000,00	(29.340.000,00)	(14,34)
Belanja Tunjangan Beras ASN	277.318.000,00	274.254.540,00	98,90	251.804.340,00	22.450.200,00	8,92
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	49.424.000,00	32.611.337,00	65,98	32.224.444,00	386.893,00	1,20
Belanja Pembulatan Gaji ASN	107.000,00	71.399,00	66,73	72.943,00	(1.544,00)	(2,12)
Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN	529.004.000,00	493.768.924,00	93,34	527.150.034,00	(33.381.110,00)	(6,33)
Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.315.000,00	11.459.024,00	93,05	49.102.275,00	(37.643.251,00)	(76,66)
Belanja iuran Jaminan Kematian ASN	36.944.000,00	34.377.078,00	93,05	-	34.377.078,00	#DIV/0!
Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	7.715.479.000,00	7.553.329.231,00	97,90	7.953.149.798,00	(399.820.567,00)	(5,03)

5.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.7.686.707.033

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.686.707.033,00 atau 96,52 % dari anggaran Rp 7.963.893.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 8.184.457.590,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.963.893.000,00	7.686.707.033,00	96,52	8.184.457.590,00	(497.750.557,00)	(6,08)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Tambahan Penghasilan berdasarkan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!



Kelangkaan Profesi
ASN

Tambahan
Penghasilan
berdasarkan Prestasi
Kerja ASN

	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	7.963.893.000,00	7.686.707.033,00	96,52	8.184.457.590,00	(497.750.557,00)	(6,08)

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp67.310.026.839,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 67.310.026.839,00 atau 91,20% dari anggaran Rp 73.807.048.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp38.177.981.973,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Barang	24.818.822.000,00	22.683.134.827,00	91,39	2.798.735.900,00	19.884.398.927,00	710,48
Belanja Jasa	38.209.920.000,00	34.893.614.777,00	91,32	29.737.970.234,00	5.155.644.543,00	17,34
Belanja Pemeliharaan	3.268.339.000,00	3.097.798.064,00	94,78	2.068.419.325,00	1.106.737.439,00	53,51
Belanja Perjalanan Dinas	7.509.967.000,00	6.635.479.171,00	88,36	3.419.332.514,00	3.216.146.657,00	94,06
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	#DIV/0!	153.524.000,00	(153.524.000,00)	(100,00)
Belanja Barang dan Jasa BOP	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	73.807.048.000,00	67.310.026.839,00	91,20	38.177.981.973,00	29.209.403.566,00	76,51

Belanja Barang dan Jasa yang tidak memenuhi target dikarenakan :

- Kegiatan menyesuaikan kebutuhan dan mengikuti kebijakan PPKM mendadak Jawa Bali pada triwulan ke 3 sehingga banyak kegiatan dilaksanakan secara daring
- Belanja Barang sub Belanja Makan dan Minum dengan penyerapan 77,07% dikarenakan kegiatan Pameran FK Mitra di Bidang Informasi Komunikasi Publik tidak terserap karena kebijakan PPKM
- Belanja Jasa sub Belanja Sewa Sarana Mobilitas dengan penyerapan 30,49% dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara daring mengikuti kebijakan PPKM
- Belanja Pemeliharaan sub belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dengan penyerapan 85,39% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan belanja STNK



- Belanja Perjalanan Dinas dengan penyerapan 88,36% dikarenakan mengikuti kebijakan PPKM sehingga banyak kegiatan dilaksanakan secara daring melalui virtual zoom dan koordinasi melalui WA

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang Rp 22.683.134.827,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 22.683.134.827,00 atau 91,39% dari anggaran Rp 24.818.822.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.798.735.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Bahan Pakai Habis	22.838.944.000,00	20.985.656.912,00	91,89	1.343.969.500,00	19.641.687.412,00	1.461,47
Belanja Bahan/Material			#DIV/0!	2.210.000,00	(2.210.000,00)	(100,00)
Belanja Cetak/Penggandaan	1.066.883.000,00	993.807.315,00	93,15	805.740.550,00	188.066.765,00	23,34
Belanja Makanan dan Minuman	912.995.000,00	703.670.600,00	77,07	513.315.850,00	190.354.750,00	37,08
Belanja Pakaian Kerja	-	-	#DIV/0!	133.500.000,00	(133.500.000,00)	(100,00)
Belanja Barang Bekas Dipakai	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	24.818.822.000,00	22.683.134.827,00	91,39	2.798.735.900,00	19.884.398.927,00	710,48

Belanja Barang yang tidak memenuhi target dikarenakan :

- Belanja Bahan Habis Pakai dengan penyerapan 91,89% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
- Belanja Cetak / Penggandaan dengan penyerapan 93,15% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
- Belanja Makan dan Minum dengan penyerapan 77,07% dikarenakan kegiatan Pameran FK Mitra di Bidang Informasi Komunikasi Publik tidak terserap karena kebijakan PPKM

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa Rp 34.893.614.777,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.893.614.777,00 atau 91,22% dari anggaran Rp38.209.920.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp29.737.970.234,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa



*Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020*

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Jasa Kantor	35.179.975.000,00	31.938.751.777,00	90,79	27.316.487.734,00	4.622.264.043,00	16,92
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	261.593.000,00	254.743.200,00	97,38	262.748.000,00	(8.004.800,00)	(3,05)
Belanja Sewa Tanah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	670.782.000,00	666.165.000,00	99,31	781.920.000,00	(115.755.000,00)	(14,80)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.400.000,00	5.000.000,00	30,49	-	5.000.000,00	#DIV/0!
Belanja Sewa Alat Berat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	2.000.000,00	#DIV/0!
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.520.000,00	52.560.000,00	96,40	21.510.000,00	31.050.000,00	144,35
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.653.400.000,00	1.625.812.500,00	98,33	1.199.694.500,00	426.118.000,00	35,52
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	371.250.000,00	348.582.300,00	93,89	155.610.000,00	192.972.300,00	124,01
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	38.209.920.000,00	34.893.614.777,00	91,32	29.737.970.234,00	5.155.644.543,00	17,34

Belanja Jasa yang tidak memenuhi target dikarenakan :

- Belanja Jasa Kantor dengan penyerapan 90,79% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan belanja STNK
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas dengan penyerapan 30,49% dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara daring mengikuti kebijakan PPKM
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS / PPPK dengan penyerapan 93,89% dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara daring mengikuti kebijakan PPKM

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Rp 3.097.798.064,00



Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.097.798.064,00 atau 94,78% dari anggaran Rp 3.268.339.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.068.419.325,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	446.784.000,00	409.874.050,00	91,74	336.676.950,00	73.197.100,00	21,74
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.462.889.000,00	2.367.276.914,00	96,12	1.426.550.575,00	940.726.339,00	65,94
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.774.000,00	99,77	-	99.774.000,00	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!	6.960.000,00	(6.960.000,00)	(100,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	258.666.000,00	220.873.100,00	85,39	298.231.800,00	(77.358.700,00)	(25,94)
Jumlah	3.268.339.000,00	3.097.798.064,00	94,78	2.068.419.325,00	1.106.737.439,00	53,51

Belanja Pemeliharaan yang tidak memenuhi target dikarenakan :

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan penyerapan 91,74% dikarenakan adanya pengembalian sisa lelang
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dengan penyerapan 85,39% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan belanja STNK

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp 6.635.479.171,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6.635.479.171,00 atau 88,36% dari anggaran Rp 7.509.967.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.419.332.514,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.509.967.000,00	6.635.479.171,00	88,36	3.419.332.514,00	3.216.146.657,00	94,06
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	7.509.967.000,00	6.635.479.171,00	88,36	3.419.332.514,00	3.216.146.657,00	94,06

Belanja Perjalanan Dinas tidak memenuhi target dikarenakan :

Mengikuti kebijakan PPKM kegiatan dilaksanakan secara daring melalui virtual zoom

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat



Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 153.524.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	#DIV/0!	153.524.000,00	(153.524.000,00)	(100,00)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	153.524.000,00	(153.524.000,00)	(100,00)

5.1.2.1.5. Belanja Hibah Rp3.500.000.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 100% dari target Rp3.500.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Hibah kepada BUMN	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Hibah kepada BUMD	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	-	-	#DIV/0!
Belanja Hibah Dana BOS	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	-	-	#DIV/0!

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!



Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
Jumlah

-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
---	---	---------	---	---	---------

5.1.2.2. BELANJA MODAL **Rp13.567.576.251,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.567.576.251,00 atau 96,85% dari anggaran Rp14.008.173.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.977.647.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.008.173.000,00	13.567.576.251,00	96,85	20.913.002.100,00	(7.345.425.849,00)	(35,12)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	#DIV/0!	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!	52.645.000,00	(52.645.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	14.008.173.000,00	13.567.576.251,00	96,85	20.977.647.100,00	(7.410.070.849,00)	(35,32)

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah **Rp0,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Tanah Persil	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Tanah Non Persil	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Lapangan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp13.567.576.251,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.567.576.251,00 atau 96,85% dari anggaran Rp14.008.173.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.913.002.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
---------------------------------	-----------	---	-----------	-------------------------	---



*Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020*

Belanja Modal Alat Besar	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	#DIV/0!	68.740.000,00	(68.740.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	141.567.000,00	135.070.000,00	95,41	36.560.000,00	98.510.000,00	269,45
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.165.017.000,00	4.813.588.950,00	93,20	3.117.984.500,00	1.695.604.450,00	54,38
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Komputer	8.701.589.000,00	8.618.917.301,00	99,05	17.684.767.600,00	(9.065.850.299,00)	(51,26)
Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	#DIV/0!	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Alat Peraga	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Proses/Produksi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Rambu-rambu	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	14.008.173.000,00	13.567.576.251,00	96,85	20.913.002.100,00	(7.345.425.849,00)	(35,12)

(Dalam Rupiah)

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar

Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Besar Apung	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Bantu	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan

Rp0,00



Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp68.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	#DIV/0!	68.740.000,00	(68.740.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	68.740.000,00	(68.740.000,00)	(100,00)

5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Ukur	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat Pertanian Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp135.070.000,00



Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 135.070.000,00 atau 95,41% dari anggaran Rp 141.567.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 36.560.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Kantor	41.567.000,00	36.840.000,00	88,63	1.800.000,00	35.040.000,00	1.946,67
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	98.230.000,00	98,23	34.760.000,00	63.470.000,00	182,59
Jumlah	141.567.000,00	135.070.000,00	95,41	36.560.000,00	98.510.000,00	269,45

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 4.813.588.950,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.813.588.950,00 atau 93,20% dari anggaran Rp 5.165.017.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.117.984.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Studio	2.426.310.000,00	2.260.315.450,00	93,16	2.447.157.000,00	(186.841.550,00)	(7,64)
Belanja Modal Alat Komunikasi	2.738.707.000,00	2.553.273.500,00	93,23	670.827.500,00	1.882.446.000,00	280,62
Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	5.165.017.000,00	4.813.588.950,00	93,20	3.117.984.500,00	1.695.604.450,00	54,38

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tidak memenuhi target dikarenakan adanya pengembalian sisa lelang

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp 0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Kedokteran	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!



**5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat Laboratorium Rp
0,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya"	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica"	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

**5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Alat Persenjataan Rp
0,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Senjata Api	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Senjata Non Senjata Api	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Senjata Sinar	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Alat Khusus Kepolisian	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Komputer Rp 8.618.917.301,00



Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.618.917.301,00 atau 99,05% dari anggaran Rp8.701.589.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.684.767.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Komputer Unit	1.528.920.000,00	1.481.895.500,00	96,92	1.027.809.600,00	454.085.900,00	44,18
Belanja Modal Peralatan Komputer	7.172.669.000,00	7.137.021.801,00	99,50	16.656.958.000,00	(9.519.936.199,00)	(57,15)
Jumlah	8.701.589.000,00	8.618.917.301,00	99,05	17.684.767.600,00	(9.065.850.299,00)	(51,26)

5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp 0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

5.1.2.2.2.12 Belanja Modal Alat Pengeboran Rp 0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

5.1.2.2.2.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp 0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
--	---------------------------------	-----------	---	-----------	-------------------------	---



Belanja Modal Sumur	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Produksi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

5.1.2.2.2.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp 0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Bantu Produksi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

5.1.2.2.2.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp 0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Alat Deteksi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Pelindung	-	-	#DIV/0!	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Alat SAR	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(100,00)

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!



Belanja Modal Monumen	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Jalan dan Jembatan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Bangunan Air	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Instalasi	-	-	#DIV/0!	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
Jaringan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)

5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi Rp 0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	-	-	#DIV/0!	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Instalasi Pertahanan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Instalasi Gas	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Instalasi Pengaman	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Instalasi Lain	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp0,00



Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 52.645.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Hewan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Biota	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Perairan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Tanaman	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	#DIV/0!	52.645.000,00	(52.645.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	52.645.000,00	(52.645.000,00)	(100,00)

5.1.2.2.5.8 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp 0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 52.645.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	#DIV/0!	52.645.000,00	(52.645.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	#DIV/0!	52.645.000,00	(52.645.000,00)	(100,00)

5.1.2.3. BELANJA TAK TERDUGA

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Tidak Terduga	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Rp99.617.639.354,00

SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar –Rp99.617.639.354,00 atau 93,11% dari anggaran –Rp.106.994.593.000,00, sedangkan Tahun 2020 sebesar –Rp77.764.066.461,00.



5.3.PENJELASAN REKENING NERACA

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Aset	40.657.293.496,35	42.266.582.314,10
Kewajiban	-	-
Ekuitas	40.657.293.496,35	42.266.582.314,10
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	40.657.293.496,35	42.266.582.314,10

5.3.1 Aset **Rp40.657.293.496,35**

Total Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp 40.712.293.496,35, turun (-1.609.288.817,75) atau -3,81% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.266.582.314,10.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Aset Lancar	1.610.000,00	631.000,00
Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap	40.361.137.029,69	41.671.063.814,10
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	294.546.466,66	594.887.500,00
Jumlah	40.657.293.496,35	42.266.582.314,10

5.3.1.1 Aset Lancar **Rp1.610.000,00**

Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.610.000,00, naik Rp.979.000,00 atau 155,15 % dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp631.000,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kas dan Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-
Piutang Retribusi Daerah	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
Piutang Lainnya	-	-



Penyisihan Piutang	-	-
Belanja Dibayar Dimuka	-	-
Persediaan	1.610.000,00	631.000,00
Jumlah	1.610.000,00	631.000,00

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas Rp0,00

Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
	2020	2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Setara Kas	-	-
Jumlah	0,00	0,00

5.3.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.509.263,00 yaitu pembayaran pajak tahun 2020 yang dipindahbukukan masuk ke pembukuan 2021, dengan saldo per 31 Desember 2020.

5.3.1.1.1.2 Setara Kas Rp0,00

Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

Nama Bank	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Bank Jateng	-	-
Bank Negara Indonesia 46	-	-
Bank Rakyat Indonesia	-	-
	-	-

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek Rp0,00

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.



5.3.1.1.3 Piutang Pajak Daerah **Rp0,00**

Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-
Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	-	-
Piutang Pajak Rokok	-	-
Jumlah	-	-

5.3.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah **Rp0,00**

Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang Retribusi Jasa Umum	-	-
Piutang Retribusi Jasa Usaha	-	-
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
Jumlah	-	-

5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka **Rp0,00**

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2021 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2020 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimukaper 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka		
Badan Penghubung		

5.1.1.1.1. Persediaan **Rp1.610.000,00**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau



diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2021, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.610.000,00, naik Rp979.000 atau 155,15% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp631.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
	2021	2020
Persediaan Barang Habis Pakai	1.610.000,00	631.000,00
Persediaan Bahan/Material	-	-
Persediaan Cetak	-	-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
Jumlah	1.610.000,00	631.000,00

➤ **Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan sebagai berikut :**

	PROVINSI JAWA TENGAH			
	STOCK OPNAME			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	TAHUN 2021			
Kode Pengguna	: 020701.00000.00000			
NO.	Objek PLU / Non PLU	Nama Akun	Jumlah	Nilai Persediaan
1	010000000620	NOTE PAGE MARKER [PAK]	1	18.000
2	010000007804	PAPER CLIP NO. 1 [DUS]	1	41.000
3	010000000040	PAPER CLIPS [DUS]	2	36.000
4	010000001432	BINDER CLIPS 107/19 MM [DUS]	1	46.000
5	010000001433	BINDER CLIPS 111/25 MM [DUS]	1	59.000
6	010000000817	STOPMAP KERTAS [BUAH]	25	75.000
7	010000002175	ISI STAPLES NO. 369 [PAK]	1	24.000
8	010000002196	ISI STAPLES NO. 10 [PAK]	3	60.000
9	010000000107	AMPLOP DINAS BESAR [LEMBAR]	10	50.000
10	010000000556	BUKU PENGADAAN BARANG BEND. 21 [BUKU]	2	90.000
11	010000002127	BLANKO SPPD NCR [BUKU]	5	350.000
12	010000000009	KERTAS HVS F4 70 GR [RIM]	2	110.000
13	010000000481	KERTAS HVS FOLIO F4 70 GRAM [RIM]	4	220.000
14	010000000661	HVS F4 60GR [RIM]	2	94.000
15	010000000665	HVS F4 70 GRAM WARNA [RIM]	2	150.000
16	010000000169	KERTAS FAXIMILE [ROLL]	1	30.000
17	010000000047	STOPMAP DINAS [BUAH]	3	30.000
18	010000005917	REFIL TINTA 60 ML BER ID [BOTOL]	1	120.000
19	010000003852	BATU BATERAY KECIL [PCS]	2	7.000
JUMLAH			69	1.610.000



5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Rp0,00

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.1.3 Aset Tetap Rp40.361.137.029,69,00

Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.416.137.029,69,00 turun (-Rp1.309.826.784,41) atau -3,14% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.671.063.814,10 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Tanah	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00
Peralatan dan Mesin	97.651.745.594,00	82.209.707.343,00
Gedung dan Bangunan	5.442.697.874,00	5.442.697.874,00
Jalan,Irigasi, dan Jaringan	475.645.400,00	475.645.400,00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(70.185.951.838,31)	(53.433.986.802,90)
Jumlah	40.361.137.029,69	41.671.063.814,10

Nilai Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan rincian tambah dan kurang.

Penambahan Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sejumlah 807 buah senilai Rp.27.749.581.052,- dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Aset Tetap		
Saldo Awal	2.964	95.105.050.617
Penambahan		
Belanja Modal	456	13.567.576.251
Belanja Barang / Jasa	1	50.600.000
Hibah		
Mutasi Masuk	6	1.925.892.000
Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap	344	12.029.896.801
Reklasifikasi Masuk antar Aset Lainnya		
Koreksi		174.515.000
Jumlah	807	27.749.581.052

Berkurangnya aset tetap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dikarenakan :

Berkurang		
Ekstrakontable	15	7.160.000
Mutasi Keluar		
Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap	344	12.029.896.801
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	2	78.485.000
Koreksi Belanja Modal	2	27.500.000
Koreksi Tahun Lalu	2	135.900.000
Jumlah	365	12.278.941.801
Grand Total	3.406	110.575.689.868



Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2021 yang terdiri dari belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp13.567.576.251,00.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah realisasi pengadaan barang/jasa melalui belanja barang/jasa selama tahun 2021 yang terdiri dari belanja barang/jasa Peralatan dan Mesin senilai Rp50.600.000,00.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun asset tetap karena penyesuaian jenis rekening asset tetap yang seharusnya yang terdiri dari Reklasifikasi masuk aset tetap Peralatan dan Mesin senilai
Rp. 12.029.896.801,00
- ✓ Reklasifikasi Masuk Ke Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud yang terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp78.485.000,00
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap yang terdiri dari bangunan gedung senilai Rp135.900.000,00.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomptabel adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Barang
1	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar. Tampungan	2021	2	330.000	660.000
2	Alat Komputer. Tampungan	2021	13	500.000	6.500.000
Total			15		7.160.000

- ✓ Reklasifikasi Keluar Antar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun asset tetap karena penyesuaian jenis rekening asset tetap yang



seharusnya yang terdiri dari Reklasifikasi keluar peralatan dan mesin senilai Rp. 12.029.896.801,00

- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan asset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2021 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp135.900.000,00.

5.3.1.3.2 Tanah **Rp6.977.000.000,00**

Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.977.000.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.977.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		<i>(Dalam Rupiah)</i>			
		2020	Bertambah	Berkurang	2019
Tanah		6.977.000.000,00	-	-	6.977.000.000,00
	Jumlah	6.977.000.000,00	-	-	6.977.000.000,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	6.977.000.000,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Berkurang		
Ekstrakomtable	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Grand Total	Rp	6.977.000.000,00

Adapun rincian tanah menurut jenis dan lokasinya adalah sebagai berikut :

1. Tanah Bangunan, Jl. Tri Lomba Juang No. 18, Semarang yang digunakan untuk Kantor KIP. Senilai Rp2.217.500.000,00
2. Tanah Bangunan, Jl. Jl.Menteri Supeno I/2 Semarang yang digunakan



untuk kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
Senilai Rp3.330.000.000,00

3. Tanah Bangunan, Jl. Tri Lomba Juang No. 6, Semarang yang digunakan untuk Sekretariat KPID. Senilai Rp1.429.500.000,00

5.3.1.3.3 Peralatan dan Mesin **Rp 97.651.745.594,00**

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp 97.679.245.594,00 naik Rp 15.442.038.251,00 atau 18,78% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 82.209.707.343,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Alat Besar	2.134.235.500,00	1.709.449.500,00
Alat Angkutan	8.274.440.673,00	6.773.334.673,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	26.242.000,00	21.050.000,00
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.719.825.529,00	5.913.455.629,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.528.803.951,00	7.526.486.361,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat Persenjataan	-	-
Komputer	69.912.260.941,00	60.209.994.180,00
Alat Eksplorasi	-	-
Alat Pengeboran	-	-
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
Alat Bantu Eksplorasi	-	-
Alat Keselamatan Kerja	-	-
Alat Peraga	-	-
Peralatan Proses/Produksi	-	-
Rambu-rambu	55.937.000,00	55.937.000,00
Peralatan Olahraga	-	-
Jumlah	97.651.745.594,00	82.209.707.343,00

(Dalam Rupiah)

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	82.209.707.343,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	13.567.576.251,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	50.600.000,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	1.925.892.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	12.004.896.801,00



Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	12.029.896.80,00
Koreksi	Rp	38.615.000,00
Jumlah	Rp	27.587.580.052,00
Berkurang		
Ekstrakomtable	Rp	7.160.000,00
Reklasifikasi Keluar antar asset tetap	Rp	12.004.496.801,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	78.485.000,00
Mutasi Keluar	Rp	678.020.000,00
Koreksi Belanja Modal	Rp	27.500.000,00
Jumlah	Rp	12.118.041.801,00
Grand Total	Rp	97.623.308.594,00

5.3.1.3.2.1 Alat Besar Rp 2.134.235.500,00

Alat Besar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.134.235.500,00, naik Rp0,00 atau 0,00% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.709.449.500,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Alat Besar Darat	966.280.000,00	966.280.000,00
Alat Besar Apung	-	-
Alat Bantu	1.167.955.500,00	743.169.500,00
Jumlah	2.134.235.500,00	1.709.449.500,00

5.3.1.3.2.2 Alat Angkutan Rp 8.274.440.673,00

Alat Angkutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.274.440.673,00, naik Rp 424.786.000,00,00 atau 22,16% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.773.334.673,00 00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Alat Angkutan Darat Bermotor	8.274.440.673,00	6.773.334.673,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-
Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-
Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-
Jumlah	8.274.440.673,00	6.773.334.673,00

5.3.1.3.2.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp 26.242.000,00



Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2021 sebesar Rp 26.242.000,00 naik Rp 5.192.000,00 00 atau 24,66% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 21.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut

:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Alat Bengkel Bermesin	-	-
Alat Bengkel Tak Bermesin	5.192.000,00	-
Alat Ukur	21.050.000,00	21.050.000,00
Jumlah	26.242.000,00	21.050.000,00

5.3.1.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp6.719.825.529,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.556.303.951,00 naik Rp 3.029.817.590, atau 40,25% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.029.817.590,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Alat Studio	1.238.476.429,00	1.123.871.929,00
Alat Komunikasi	4.961.351.260,00	4.269.585.860,00
Peralatan Pemancar	519.997.840,00	519.997.840,00
Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-
Jumlah	6.719.825.529,00	5.913.455.629,00

5.3.1.3.2.10 Komputer Rp 69.912.260.941,00

Komputer per 31 Desember 2021 sebesar Rp 69.912.260.941,00 naik Rp 9.702.266.761,00 atau 16,11% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 60.209.994.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Komputer Unit	11.160.368.405,00	8.289.019.295,00
Peralatan Komputer	58.751.892.536,00	51.920.974.885,00
Jumlah	69.912.260.941,00	60.209.994.180,00

5.3.1.3.2.18 Rambu-Rambu Rp 55.937.000,00



Rambu Rambu per 31 Desember 2021 sebesar Rp 55.937.000,00 tetap dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 55.937.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	55.937.000,00	55.937.000,00
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	-	-
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	-	-
Jumlah	55.937.000,00	55.937.000,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan **Rp5.442.697.874,00**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.442.697.874,00, naik Rp0,00 atau 0,00% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.442.697.874,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Bangunan Gedung	5.442.697.874,00	5.442.697.874,00
Monumen	-	-
Bangunan Menara	-	-
Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
Jumlah	5.442.697.874,00	5.442.697.874,00

5.3.1.3.3.1 Bangunan Gedung **Rp5.442.697.874,00**

Bangunan Gedung per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.442.697.874,00, naik Rp0,00 atau 0,00% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.442.697.874,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.442.697.874,00	5.281.797.874,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	160.900.000,00
Jumlah	5.442.697.874,00	5.442.697.874,00

(Dalam Rupiah)

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

SaldoAwal	Rp	5.442.697.874,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0,00
BelanjaBarang/Jasa	Rp	0,00



Hibah	Rp	0,00
MutasiMasuk	Rp	0,00
ReklasifikasiMasukantarasettetap	Rp	25.000.000,00
ReklasifikasiMasukkeAsetLainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	135.900.000,00
Jumlah	Rp	160.900.000,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar asset tetap	Rp	25.000.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	0,00
Koreksi	Rp	160.900.000,00
Jumlah	Rp	160.900.000,00
Grand Total	Rp	5.442.697.874,00

5.3.1.3.4 Jalan, irigasi dan Jaringan **Rp 475.645.400,00**

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp475.645.400,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp463.645.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air	-	-
Instalasi	361.662.000,00	361.662.000,00
Jaringan	113.983.400,00	113.983.400,00
Jumlah	475.645.400,00	475.645.400,00

(Dalam Rupiah)

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	475.645.400,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk antar asset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00



Berkurang

Ekstrakontable	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar asset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Grand Total Rp **475.645.400,00**

5.3.1.3.4.3 Instalasi Rp **361.662.000,00**

Instalasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 361.662.000,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 361.662.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Instalasi Air Bersih/Air Baku	66.200.000,00	66.200.000,00
Instalasi Air Kotor	-	-
Instalasi Pengolahan Sampah	-	-
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-
Instalasi Pembangkit Listrik	-	-
Instalasi Gardu Listrik	295.462.000,00	295.462.000,00
Instalasi Pertahanan	-	-
Instalasi Gas	-	-
Instalasi Pengaman	-	-
Instalasi Lain	-	-
Jumlah	361.662.000,00	361.662.000,00

5.3.1.3.4.4 Jaringan Rp **113.983.400,00**

Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 113.983.400,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 113.983.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Jaringan Air Minum	-	-
Jaringan Listrik	113.983.400,00	113.983.400,00
Jaringan Telepon	-	-



Jaringan Gas	-	-
Jumlah	113.983.400,00	113.983.400,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp0,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Bahan Perpustakaan	-	-
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	-	-
Hewan	-	-
Biota Perairan	-	-
Tanaman	-	-
Barang Koleksi Non Budaya	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
Jumlah	-	-

	<i>(Dalam Rupiah)</i>			
	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Buku Perpustakaan	-	-	-	-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-	-
Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	0,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
 Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	0,00



ReklasifikasiKeluarantarasettetap	Rp	0,00
ReklasifikasikeluarkeAsetLainnya	Rp	0,00
MutasiKeluar	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Grand Total	Rp	0,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp0,00**

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan	(Dalam Rupiah)			
	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Pemasangan Lift	-	-	-	-
Pengembangan Gedung Dinas Kominfo	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

SaldoAwal	Rp	0,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0,00
BelanjaBarang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
MutasiMasuk	Rp	0,00
ReklasifikasiMasukantarasettetap	Rp	0,00
ReklasifikasiMasukkeAsetLainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	0,00
ReklasifikasiKeluarantarasettetap	Rp	0,00
ReklasifikasikeluarkeAsetLainnya	Rp	0,00
MutasiKeluar	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Grand Total	Rp	0,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp70.185.951.838,31)

Akumulasi Penyusutan per Desember 2020 sebesar (Rp.70.158.451.838,31) naik -16.724.465.035,41 atau 31,30% dari saldo



per 31 Desember 2019 sebesar (Rp.53.433.986.802,90) dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(67.045.694.052,11)	(50.418.133.515,20)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.038.061.011,20)	(2.926.099.314,36)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(102.196.775,00)	(89.753.973,34)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	(70.185.951.838,31)	(53.433.986.802,90)

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan per Desember 2020 sebesar (Rp. (67.018.194.052,11) naik - 16.600.060.536,91 atau 32,92% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp. (50.418.133.515,20)) dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(1.224.415.750,00)	(716.302.062,50)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(7.482.676.048,00)	(5.862.539.110,50)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(21.569.200,00)	(21.050.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(5.492.157.810,62)	(4.990.477.556,20)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(5.458.674.287,62)	(4.048.019.031,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan	-	-
Akumulasi Penyusutan Komputer	(47.331.240.330,87)	(34.751.777.255,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-



Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-
Akumulasi Penyusutan Rambu- rambu	(34.960.625,00)	(27.968.500,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-
Jumlah	(67.045.694.052,11)	(50.418.133.515,20)

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per Desember 2021 sebesar (Rp. 3.038.061.011,20) naik – 111.961.696,84 atau 3,82% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar (Rp.2.926.099.314,36) dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(3.038.061.011,20)	(2.926.099.314,36)
Akumulasi Penyusutan Monumen	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	-	-
Jumlah	(3.038.061.011,20)	(2.926.099.314,36)

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan per Desember 2021 sebesar (Rp. 102.196.775,00) naik (-12.442.801,66) atau 13,86% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar (Rp.89.753.973,34) dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air	-	-
Instalasi	(84.223.850,00)	(74.630.633,34)



Jaringan	(17.972.925,00)	(15.123.340,00)
Jumlah	(102.196.775,00)	(89.753.973,34)

5.3.1.5.4 Aset Lainnya Rp 294.546.466,66

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 294.546.466,66 turun Rp (300.341.033,34) atau -50,49% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp841.757.950 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tak Berwujud	1.785.036.000,00	1.745.166.000,00
Aset Lain-lain	2.642.879.674,00	2.642.879.674,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.491.966.433,34)	(1.151.755.400,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.641.402.774,00)	(2.641.402.774,00)
Jumlah	294.546.466,66	594.887.500,00

	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
	2021	2020
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Kerjasama Pemanfaatan	-	-
	-	-
	2021	2020
Aset Tak Berwujud	1.745.166.000,00	1.608.921.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.151.755.400,00)	(804.196.200,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	593.410.600,00	804.724.800,00
	2021	2020
Aset Lain-lain	2.642.879.674,00	2.895.104.674,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.642.879.674,00)	(2.858.071.524,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto	0,00	37.033.150,00
Jumlah Aset Lainnya	593.410.600,00	841.757.950,00

5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketigaper 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Sewa	-	-
Kerja Sama Pemanfaatan	-	-
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	-
Pinjam Pakai	-	-
Jumlah	-	-

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud **Rp1.785.036.000,00**

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.785.036.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.745.166.000,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Goodwill	-	-
Lisensi dan Franchise	-	13.700.000,00
Hak Cipta	-	-
Hak Paten	-	-
Software	1.785.036.000,00	1.731.466.000,00
Kajian	-	-
Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
Jumlah	1.785.036.000,00	1.745.166.000,00

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain **Rp2.642.879.674,00**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.642.879.674,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.895.104.674,00, dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Aset Rusak Berat/Usang	2.642.879.674,00	2.642.879.674,00



Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
Aset Tetap Lain-Lain		
Jumlah	2.642.879.674,00	2.642.879.674,00

5.3.1.5.4.1 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Rp(1.491.966.433,34)

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.491.966.433,34), turun (340.211.033,34) atau 29,53% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp1.151.755.400,00)

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	-	(2.740.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(1.491.966.433,34)	(1.149.015.400,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya		
Jumlah	(1.491.966.433,34)	(1.151.755.400,00)

5.3.1.5.5 Aset Lain-lain **Rp2.642.879.674,00**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.642.879.674,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.642.879.674,00, dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Aset Rusak Berat/Usang	2.642.879.674,00	2.642.879.674,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
Aset Tetap Lain-Lain		
Jumlah	2.642.879.674,00	2.642.879.674,00

	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
	2020	2019
Sewa	-	-
Kerjasama Pemanfaatan	-	-



	2020	2019
Bangun Guna Serah	-	-
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	-
Pinjam Pakai	-	-
Aset Tetap Rusak Berat	2.596.979.674,00	2.849.204.674,00
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
Aset Lain-lain	45.900.000	45.900.000
Jumlah	2.642.879.674,00	2.895.104.674,00

5.3.1.5.5.1 Penyusutan Aset Lain-lain Rp2.641.402.774,00

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.641.402.774,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.641.402.774,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	-	-
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	-	-
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	-
Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(2.641.402.774,00)	(2.641.402.774,00)
Jumlah	(2.641.402.774,00)	(2.641.402.774,00)

5.3.2 KEWAJIBAN Rp0,00

Total Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	-	-
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah	-	-

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp0,00



Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Dibayar Dimuka	-	-
Utang Belanja	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

5.3.1.5.6.5 Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2021.

5.3.1.6 Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-
Utang kepada Masyarakat	-	-
Jumlah	-	-

5.3.2 EKUITAS

Rp 40.712.293.496,35



Total Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 40.712.293.496,35, turun Rp1.554.288.817,75 atau -3,68% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.265.104.414,10.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Pendapatan	-	-	-	#DIV/0!
Beban	86.033.144.103,00	72.011.734.578,53	14.021.409.524,47	19,47
Surplus/(Defisit) Operasional	(86.033.144.103,00)	(72.011.734.578,53)	(14.021.409.524,47)	19,47
Kegiatan Non Operasional	-	-	-	#DIV/0!
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(86.033.144.103,00)	(72.011.734.578,53)	(14.021.409.524,47)	19,47
Pos Luar Biasa	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	(86.033.144.103,00)	(72.011.734.578,53)	(14.021.409.524,47)	19,47

5.4.1 PENDAPATAN-LO Rp0,00

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2021. Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Pendapatan Asli Daerah - LO	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Transfer - LO	-	-	-	#DIV/0!
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	-	#DIV/0!

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO Rp0,00



Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
	2020	2019
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-
Jumlah	-	-

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO **Rp0,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	-	-
Jumlah	-	-
	2021 (Rp)	2020 (Rp)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO **Rp0,00**

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Pendapatan Hibah- LO	-	-	-	#DIV/0!
Dana Darurat- LO	-	-	-	#DIV/0!
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	-	#DIV/0!

5.4.2 BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh



pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp 101.574.995.088,41 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 72.011.734.578,53

5.4.2.1 Beban Operasional **Rp86.003.144.103,00**

Beban Operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp 86.003.144.103,00 naik Rp 29.321.804.742,00 atau 51,70% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 56.711.339.361,00

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Pegawai	15.240.036.264,00	18.608.437.388,00	(3.368.401.124,00)	(18,10)
Beban Barang dan Jasa	67.285.947.839,00	38.096.901.973,00	29.189.045.866,00	76,62
Beban Bunga	-	-	-	#DIV/0!
Beban Subsidi	-	-	-	#DIV/0!
Beban Hibah	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	#DIV/0!
Beban Lain-Lain	7.160.000,00	6.000.000,00	1.160.000,00	19,33
Jumlah	86.033.144.103,00	56.711.339.361,00	29.321.804.742,00	51,70

(Dalam Rupiah)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai **Rp15.240.036.264,00**

Beban Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.240.036.264,00 turun Rp(3.368.401.124,00) atau -18,10% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.608.437.388,00

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.553.329.231,00	7.953.149.798,00	(399.820.567,00)	(5,03)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.686.707.033,00	8.184.457.590,00	(497.750.557,00)	(6,08)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	2.470.830.000,00	(2.470.830.000,00)	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	#DIV/0!
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	#DIV/0!
Beban Pegawai BOS	-	-	-	#DIV/0!



Jumlah 15.240.036.264,00 18.608.437.388,00 (3.368.401.124,00) (18,10)

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa **Rp67.285.947.839,00**

Beban Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp67.285.947.839,00, naik Rp 38.096.901.973,00 atau 76,62% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 38.096.901.973,00

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Barang	22.682.155.827,00	1.993.205.350,00	20.688.950.477,00	1.037,97
Beban Jasa	34.921.114.777,00	30.543.710.784,00	4.377.403.993,00	14,33
Beban Pemeliharaan	3.047.198.064,00	1.987.129.325,00	1.060.068.739,00	53,35
Beban Perjalanan Dinas	6.635.479.171,00	3.419.332.514,00	3.216.146.657,00	94,06
Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	153.524.000,00	(153.524.000,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BOP	-	-	-	#DIV/0!
Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	67.285.947.839,00	38.096.901.973,00	29.189.045.866,00	76,62

5.4.2.1.2.1 Beban Barang **Rp. 22.682.155.827,00**

Beban Barang per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.682.155.827,00, naik Rp20.688.950.477,00 atau 1.037,97% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.993.205.350,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Barang Pakai Habis	22.682.155.827,00	1.993.205.350,00	20.688.950.477,00	1.037,97
Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	#DIV/0!
Beban Barang Bekas Dipakai	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	22.682.155.827,00	1.993.205.350,00	20.688.950.477,00	1.037,97

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa **Rp 34.921.114.777,00**

Beban Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp 34.921.114.777,00, naik Rp 4.349.903.993,00 atau 14,33% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.543.710.784,00.

(Dalam Rupiah)

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Jasa Kantor	31.966.251.777,00	28.122.228.284,00	3.844.023.493,00	13,67



*Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020*

Beban Jasa Asuransi	254.743.200,00	262.748.000,00	(8.004.800,00)	(3,05)
Beban Sewa Tanah	666.165.000,00	-	666.165.000,00	#DIV/0!
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	56.060.000,00	20.510.000,00	35.550.000,00	173,33
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-	781.920.000,00	(781.920.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	#DIV/0!
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	250,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	388.773.000,00	-	388.773.000,00	#DIV/0!
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.237.039.500,00	1.199.694.500,00	37.345.000,00	3,11
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	#DIV/0!
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	#DIV/0!
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	348.582.300,00	155.610.000,00	192.972.300,00	124,01
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	-	-	-	#DIV/0!
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	34.921.114.777,00	30.543.710.784,00	4.377.403.993,00	14,33

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp 3.047.198.064,00

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.047.198.064,00 naik Rp1.060.068.739,00 atau 53,35% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.987.129.325,00.

	<i>(Dalam Rupiah)</i>			
	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	580.147.150,00	634.908.750,00	(54.761.600,00)	(8,63)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.367.276.914,00	1.345.260.575,00	1.022.016.339,00	75,97
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.774.000,00	-	99.774.000,00	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	6.960.000,00	(6.960.000,00)	(100,00)
Jumlah	3.047.198.064,00	1.987.129.325,00	1.060.068.739,00	53,35

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas Rp 6.635.479.171,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.635.479.171,00, naik Rp 3.216.146.657,00 atau 94,06% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.419.332.514,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.635.479.171,00	3.419.332.514,00	3.216.146.657,00	94,06
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	6.635.479.171,00	3.419.332.514,00	3.216.146.657,00	94,06

5.4.2.1.3 Beban Bunga Rp0,00



Beban Bunga per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.4 **Beban Subsidi** **Rp0,00**

Beban Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 Rp0,00.

5.4.2.1.5 **Beban Hibah** **Rp3.500.000.000,00**

Beban Hibah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.500.000.000,00, naik Rp 3.500.000.000,00 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.

Beban Hibah

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	#DIV/0!
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
Beban Hibah kepada BUMN	-	-	-	#DIV/0!
Beban Hibah kepada BUMD	-	-	-	#DIV/0!
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00	#DIV/0!
Beban Hibah Dana BOS	-	-	-	#DIV/0!
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00	#DIV/0!

5.4.2.1.6 **Beban Bantuan Sosial** **Rp0,00**

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.7 **Beban Lain-Lain**

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.160.000,00, naik Rp1.160.000,00 atau 19,33% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.000.000,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Lain-Lain	7.160.000,00	6.000.000,00	1.160.000,00	19,33



Jumlah	7.160.000,00	6.000.000,00	1.160.000,00	19,33
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 15.569.350.985,41

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp 15.569.350.985,41, naik Rp 268.955.767,88 atau 1,76% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 15.300.395.217,53.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Peralatan dan Mesin	15.033.308.036,91	14.782.565.269,00	250.742.767,91	1,70
Beban Gedung dan Bangunan	163.603.696,84	157.827.946,85	5.775.749,99	3,66
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.442.801,66	12.442.801,68	(0,02)	(0,00)
Beban Aset Tetap Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	359.996.450,00	347.559.200,00	12.437.250,00	3,58
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	15.569.350.985,41	15.300.395.217,53	268.955.767,88	1,76

5.4.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp 15.033.308.036,91, naik Rp 250.742.767,91 atau 1,70% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 14.782.565.269,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Penyusutan Alat Besar	202.798.750,00	189.524.187,50	13.274.562,50	7,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	358.699.375,00	361.569.812,50	(2.870.437,50)	(0,79)
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	519.200,00	-	519.200,00	#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	501.680.254,42	503.905.276,00	(2.225.021,58)	(0,44)
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.383.155.256,62	1.113.026.034,00	270.129.222,62	24,27
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Komputer	12.579.463.075,87	12.607.547.834,00	(28.084.758,13)	(0,22)
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	#DIV/0!



Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Rambu-rambu	6.992.125,00	6.992.125,00	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	15.033.308.036,91	14.782.565.269,00	250.742.767,91	1,70

5.4.2.2.2 Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Beban Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2021 sebesar Rp 163.603.696,84, naik Rp 5.775.749,99 atau 3,66% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 157.827.946,85.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	163.603.696,84	157.827.946,85	5.775.749,99	3,66
Beban Penyusutan Monumen	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	163.603.696,84	157.827.946,85	5.775.749,99	3,66

5.4.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.442.801,66 turun (0,02) atau 0,00% dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 12.442.801,68.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Jalan dan Jembatan	-	-	-	#DIV/0!
Bangunan Air	-	-	-	#DIV/0!
Instalasi	9.593.216,66	9.593.216,68	(0,02)	(0,00)
Jaringan	2.849.585,00	2.849.585,00	-	-
Jumlah	12.442.801,66	12.442.801,68	(0,02)	(0,00)

5.4.2.2.5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp 359.996.450,00, naik Rp 12.437.250,00 atau 3,66% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 347.559.200,00



	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	2.511.666,66	2.740.000,00	(228.333,34)	(8,33)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	#DIV/0!
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	#DIV/0!
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	357.484.783,34	-	357.484.783,34	#DIV/0!
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	-	344.819.200,00	(344.819.200,00)	(100,00)
Jumlah	359.996.450,00	347.559.200,00	12.437.250,00	3,58

5.4.2.3Beban Transfer

Rp0,00

Beban Transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari kegiatan Non Operasi Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Surplus Non Operasional	-	-	-	#DIV/0!
Defisit Non Operasional	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	-	#DIV/0!

5.5PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.5.2 Ekuitas Awal **Rp36.514.250.431,63**

Nilai ekuitas awal tahun 2021 adalah sebesar Rp36.514.250.431,63. Nilai ini merupakan saldo akhir ekuitas pada tahun 2020.

5.5.3 Surplus/Defisit-LO **(101.602.495.088,41)**

Defisit-LO per 31 Desember 2021 sebesar -Rp101.602.495.088,41 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang



mengurangi nilai ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

5.5.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar **Rp 375.566.916,66**

Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp375.566.916,66 dapat dijelaskan sebagai dengan rincian :

- a. Koreksi/ Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp1.909.507.000,00, dengan rincian:

Uraian	Rp
Koreksi/PenyesuaianTambahAsetTetapdariMutasiAntar SKPD	1.925.892.000,00
Koreksi/PenyesuaianTambahPenilaian Aset Tetap	174.515.000,00
Koreksi/PenyesuaianKurangAsetTetapdariMutasiAntar SKPD	-
Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	(190.900.000,00)
Jumlah	1.909.507.000,00

- b. Koreksi/ Penyesuaian Penyusutan sebesar -Rp.1.515.110.500,00, dengan rincian :

Uraian	Rp
Koreksi/PenyesuaianTambahPenyusutan	(1.566.752.500,00)
Koreksi/PenyesuaianKurangPenyusutan	51.642.000,00
Jumlah	(1.515.110.500,00)

- c. Koreksi/ Penyesuaian Aset Lainnya sebesar -Rp38.615.000, dengan rincian:

Uraian	Rp
Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud	-
Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud	(38.615.000,00)
Jumlah	(38.615.000,00)

- d. Koreksi/ Penyesuaian Amortisasi sebesar Rp.19.785.416,66, dengan rincian:

Uraian	Rp
Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	-
Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	19.785.416,66
Jumlah	19.785.416,66



BAB 6

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

6.1.1. KEDUDUKAN

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.1.2. TUGAS

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

6.1.3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi:



1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

6.2. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH Per 31 Desember 2021





BAB 7

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah TA 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah TA 2021 dan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2021. Informasi dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini juga dapat berguna bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Semarang, Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**



RIENA RETNANINGRUM,SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19641026198909 0 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.....	I
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.....	II
Neraca Komparatif Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.....	VI
Laporan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.....	VIII
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.....	X
 Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	7
 Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.....	 9
2.1 Ekonomi Makro.....	9
2.2 Kebijakan Keuangan.....	10
 Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	 16
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum.....	16
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	16
 Bab 4 Kebijakan Akuntansi.....	 22
4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah..	22
4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.....	22
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.....	23
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.....	24
 Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	 44
5.1 Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	44
5.1.1. Pendapatan.....	44
5.1.2. Belanja.....	47
5.2 Penjelasan Pos – Pos Neraca.....	62
5.2.1. Aset.....	62
5.2.2. Kewajiban.....	83
5.2.2. Ekuitas Dana.....	85

5.3	Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional.....	85
5.3.1.	Pendapatan.....	85
5.3.2.	Beban.....	87
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	93
Bab 6	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan.....	96
Bab 7	Penutup.....	98
	Lampiran.....	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon : 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Februari 2022

PENGGUNA ANGGARAN



RIENA RETNANINGRUM, SH

NIP.19641026 198909 2 001